

Dok L. 06/ 27/01/2017

# **LAPORAN KINERJA**

**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2016**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
Ambon, Januari 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Permasalahan; 5) Bab V Penutup dan Lampiran-lampiran.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, Januari 2017

**Kepala BBPPTP Ambon**

  
**Ir. Azwin Amir, MM**  
**NIP. 196011301981031002**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2016 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BBPPTP Ambon Tahun 2016 ditetapkan Indikator Kinerja dengan target sebagai berikut : Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi benih Perkebunan dalam rangka Pemberian Sertifikat jumlah benih yang disertifikasi dengan target 200.000 batang dengan realisasi sebanyak 6.395.047 atau sebesar 300% benih bersertifikat/berlabel, dan Teknologi terapan perlindungan perkebunan sebanyak 12 paket dengan realisasi 100%.

Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 22.982.504.000,- dan direvisi menjadi Rp. 23.520.371.000,- dan direvisi menjadi Rp. 23.319.311.000,- dikarenakan penghematan anggaran. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2016 sebesar Rp. 21.743.057.181,- atau sebesar (93,67%). Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut : realisasi pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis komoditi Perkebunan sebesar (99,66%), Pengawasan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebesar (90,80%), Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (86,23%), Fasilitasi Teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (94,90%), Layanan Perkantoran (90,25%), Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar (98,98%), Gedung/Bangunan sebesar (99,83%)

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, namun masih banyak ditemui kendala/hambatan, yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain kurangnya pemahaman petani dalam penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel serta penerapan teknologi PHT dalam usaha perkebunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya yang ditempuh diantaranya melakukan pembinaan teknis kepada petani, penangkar, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019.

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	
2.1.1. Visi .....	5
2.1.2. Misi .....	5
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon.....	6
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon.....	8
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon .....	8
2.1.6. Program BBPPTP Ambon .....	11
2.1.7. Fokus Kegiatan BBPPTP Ambon .....	11
2.1.8. Strategi BBPPTP Ambon.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016	
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
3.1. Evaluasi Kinerja .....	14
3.2. Succes Story Pembangunan Perkebunan	
Tahun 2016.....	16
<b>BAB IV PERMASALAHAN, UPAYA TINDAK LANJUT DAN</b>	
<b>RENCANA AKSI .....</b>	<b>29</b>
4.1. Permasalahan.....	29
4.2. Isu Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti .....	31
<b>BAB V PENTUTUP .....</b>	<b>35</b>
5.1. Kesimpulan .....	35
5.2. Saran.....	35
Lampiran	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2016.....	11
Tabel 2	Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2016.....	14
Tabel 3	Capaian Kinerja BBPPTP Ambon.....	13
Tabel 4	Sertifikasi dan Pelabelan Benih layak Edar.....	16
Tabel 5	Pengujian Kemurnian Fisik, Kadar Air dan Daya Kecambah.....	17
Tabel 6	Eksplorasi dan Inventarisasi benih Unggul.....	19
Tabel 7	Rekapitulasi Pengujian Aflatoksin.....	22
Tabel 8	Rekapitulasi Pengujian Residu Pestisida.....	22
Tabel 9	Rekapitulasi Pengujian Mutu APH.....	23

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output).....	39
----------	--	----



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam upaya mendukung kegiatan peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan diperhadapkan dengan kendala yakni kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal pemanfaatannya maupun aksesibilitasnya, adanya serangan OPT, dampak gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak.

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan membuka peluang terhadap naiknya permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan. Dunia usaha perbenihan perkebunan juga semakin berkembang dalam menghasilkan beragam produk benih yang memberikan hasil yang bermutu dan memiliki produktivitas yang baik. Teknologi yang menghasilkan produk pestisida organik/biopestisida juga makin mengemuka karena tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan.

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan tidak lepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih tanaman perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas tanaman perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul bermutu (tepat varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi". Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif.

Areal perkebunan pada wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP Ambon) yang meliputi Pulau Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua, terdiri dari Perkebunan Rakyat  $\pm$  93 % dengan melibatkan  $\pm$  2,52 juta KK dan Perkebunan Besar  $\pm$  7 %. Rata-rata perkebunan rakyat merupakan usaha yang diwariskan temurun-temurun,

dibudidayakan secara tradisional, diusahakan skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, sedangkan perusahaan swasta/BUMN telah diusahakan dalam skala industri.

Salah satu persoalan utama yang dialami oleh perkebunan rakyat di Indonesia Timur adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi genetiknya yaitu di atas 85 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat, tanaman tua dan rusak, penanganan pasca panen yang belum sesuai standar konsumen dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir juga berpengaruh terhadap kehilangan produksi akibat terganggunya proses metabolisme tanaman dan peningkatan serangan OPT. Menurunnya produktivitas hasil tanaman perkebunan disebabkan juga karena luas areal perkebunan yang diusahakan petani sangat terbatas, tenaga kerja yang dimiliki terbatas pada anggota keluarga, umumnya pendapatan petani dari hasil perkebunan hanya merupakan usaha sampingan sehingga tidak ditekuni dengan baik, karena jenis usaha yang lain turut mendukung kebutuhan rumahtangga petani misalnya dibidang perikanan dan kehutanan.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon sesuai amanat Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

##### 2.1.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu “ **Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkuat fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan**”

##### 2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.

2. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani
5. Mewujudkan peningkatan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.

### **2.1.3. Tujuan**

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
- 2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.
- 3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).
- 4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
- 5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
- 6) Mengembangkan teknik dan metode *surveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.
- 7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
- 8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.

- 9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 13) Meningkatkan pelayanan organisasi

#### **2.1.4. Sasaran**

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

#### **2.1.5. Arah Kebijakan**

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan



serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”. Kebijakan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.
- 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan

pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
- Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
- Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.

### 2.1.6. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program Peningkatan dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

### 2.1.7. Fokus Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu mengembangkan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, memfasilitasi kegiatan sertifikasi benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), dan meningkatkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan pelayanan organisasi yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2016

No	Kode   Nama Kegiatan	Output
	1779 Dukungan Peningkatan Produksi Berkelanjutan	Komoditas Perkebunan
1	1779.003  Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan	6 Desa
	1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	
1	1781.006  Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	50 Ha

2	1781.008	Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	12 paket
3	1781.009	Pemanfaatan Agensia Hayati	3 jenis
4	1781.010	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih	200.000 benih bersertifikat dan berlabel
5	1781.015	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	12 bulan
6	1781.994	Layanan Perkantoran	12 bulan
7	1781.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	300 unit
8	1781.998	Gedung/Bangunan	200 m <sup>2</sup>

### 2.1.8. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan 2016

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih	200.000 batang
		2. Rakitan teknologi Spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	12 paket teknologi
		3. Pembangunan kebun contoh, uji koleksi	12 Unit
		4. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agens hayati	3 Jenis
		5. Fasilitasi Teknis dukungan pengawasan dan pengujian benih dan teknologi proteksi tanaman perkebunan	12 Bulan
2.	Menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam, dampak perubahan iklim dan gangguan/konflik usaha perkebunan	1. Pembinaan dan serifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	6 Desa

Kegiatan : Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon  
 Anggaran Rp. 23.319.311.000,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Evaluasi Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2016

Pagu alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 22.982.504.000,- dan direvisi menjadi Rp. 23.520.371.000,- dan direvisi menjadi Rp. 23.319.311.000,- dikarenakan penghematan anggaran. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2016 sebesar Rp. 21.743.057.181,- atau sebesar (93,67%) dengan perincian seperti tercantum dalam tabel 2

Tabel 2. Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2016

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	2.135.600.000	2.114.292.000	99,66	100
001	Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	867.350.000	787.550.000	90,80	300
002	Pengembangan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	2.663.050.000	2.562.680.000	96,23	100
003	Fasilitasi teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	3.313.240.000	3.144.343.403	94,90	100

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
994	Layanan Perkantoran	11.135.011.000	10.049.131.078	90,25	92
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.722.460.000	1.704.930.700	98,98	100
998	Gedung/Bangunan	1.482.600.000	1.480.130.000	99,83	100

Posisi Desember 2016

Jumlah benih/bibit yang disertifikasi selama tahun 2016 ditargetkan 200.000 batang dan tersedia 12 paket teknologi terapan. Realisasi s.d bulan Desember 2016 adalah benih bersertifikat 6.395.047 batang (300%) dan paket teknologi terapan paket (100%).

Tabel 3. Capaian Kinerja BBPPTP Ambon

No	Kegiatan	Target dan Capaian	
		RKT/PK 2016	Realisasi 2016
1	2	3	4
1.	Jumlah benih yang disertifikasi	200.000	6.395.047
2.	Jumlah Teknologi Terapan perlindungan perkebunan (paket)	12	12

Posisi Desember 2016

### 3.2 Success Story Pembangunan Perkebunan Tahun 2016

#### a. Penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja

Dalam rangka memfasilitasi pelayanan pada masyarakat telah dilaksanakan penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja berupa Rehabilitasi gedung laboratorium benidan bangunan kantor BBPPTP Ambonh, pengadaan meubuler, peralatan elektronik dan perbaikan jaringan listrik

#### b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar.

Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar telah dilakukan sejumlah 6.395.047 benih yang memenuhi syarat, yang diperiksa oleh PBT di penangkar benih di wilayah kerja BBPPTP Ambon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar

Tahun	Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Tebu	Jumlah per tahun
2010	-	1.045.048	-	-	-	1.045.048
2011	-	1.539.985	28.282	-	-	1.568.267
2012	40.000	938.881	247.521	-	-	1.226.402
2013	39.000	9.977	12.893	92.539	-	154.409
2014	208.036	-	177.710	-	-	385.746
2015	12.980	-	136.407	30.995	-	180.382
2016	-	-	142.421	306.468	5.946.158	6.395.047
Jumlah	300.016	3.533.891	745.234	430.002	5.946158	10.955.301

Posisi Desember 2016



- c. Pengujian Mutu Benih di Laboratorium dan Rumah Kaca  
Pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan. Dalam rangka pengujian mutu benih telah dilaksanakan pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah jumlah sampel yang diuji sebanyak 44 sampel yang meliputi :

Tabel 5. Pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah

No.	Komoditi	2016			
		KF	KB	DB	KA
1.	Kakao	6 kali	-	6 kali	6 kali
2.	Kelapa	-	-	-	-
3.	Pala	-	-	5 kali	19 kali
4.	Cengkeh	-	-	4 kali	17 kali
5.	Aren	-	-	-	-
6.	Kapas	1 kali	-	1 kali	1 kali
7.	Wijen	-	-	-	-
8.	Karet	-	-	-	-
9.	Kopi	-	-	-	-
10.	Tembakau	1 kali	-	1 kali	1 kali
	Jumlah	7 kali	-	15 kali	37 kali

Beberapa kegiatan pengujian tahun 2016 dalam rangka pengembangan metode uji mutu benih dilaboratorium sebagai berikut :

1. Penetapan Kadar Air untuk Benih Pala metode oven suhu rendah
2. Penentuan masak fisiologis benih pala
3. Pematangan Dormasi Fisiologis pala

4. Penetapan kadar air untuk benih cengkih

d. Pengawasan dan pemeriksaan sumber benih (Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih)

a) Provinsi Maluku

Pengawasan Sumber benih di Kabupaten Buru Komoditi pala dan kelapa di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Selatan di desa Oki Lama dan Pohon Batu, Kabupaten Maluku Tengah komoditi pala di Rutah, Banda, Lehitu Barat, Leihitu dan Saparua, komoditi cengkeh di Leihitu Barat dan Saparua, komoditi kelapa Liang Awaiya, dan Yaniuwelo dan komoditi kakao di Holo, Kabupaten SBB cengkih di Tanopol, kelapa dan kakao di Walakone Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Timur komoditi kelapa di Gorom dan Pulau Panjang, komoditi sagu di Bula, kabupaten Maluku tenggara komoditi kelapa di rereang dan Tanimbar Kecil, Kabupaten MBD dan MTP komoditi kelapa.

b) Provinsi Maluku Utara

Pengawasan sumber benih pala dilaksanakan di Kabupaten Tidore Kepulauan, Desa Marikrubu Kota Ternate Tengah, Desa Dakaino Kecamatan Wasile.

Tabel 6. Eksplorasi dan Inventarisasi Benih Unggul

No.	Klon Unggul Lokal	Maluku	Maluku Utara
1.	Cengkih lokal (Ilat)	Ds. Batabual, Kab. Buru	
2.	Cengkih lokal	Ds. Waemangit, Kab. Buru	
3.	Cengkih lokal	Ds Kamariang, Kab. Seram Bagian Barat	
4.	Cengkih lokal	Ds. Latu, Kab. Seram Bagian Barat	
5.	Pala lokal (Bintangor)	Ds. Waemorat, Kab. Buru	
6.	Cengkih lokal	Ds. Lafa, Kab. Maluku Tengah	
7.	Cengkih lokal (hutan)	Ds. Hitu, Kec. Leihitu	
8.	Pala lokal		Tidore
9.	Kelapa		Bacan
10.	Kakao	Ds. Holo Kab. Maluku Tengah	
11.	Kelapa	Ds. Gale-gale, Kab. Maluku Tengah	
12.	Aren	Ds. Air Besar, Kab. Maluku Tengah	
13.	Kelapa	Ds. Wahai, Kab. Maluku Tengah	
14.	Kelapa	Ds. Taman Jaya, Kab. Seram Bagian Barat	
15.	Kelapa	Ds. Gorom Kab. Seram Bagian Timur	
16.	Cengkih lokal	Ds. Luhu, Kab. Seram Bagian Barat	
17.	Kelapa	Ds. Akebobo, Kab. Seram Bagian Timur	
18.	Cengkih lokal	Ds. Ambalau, Kab. Buru Selatan	
19.	Kayu manis dan Kenari	Banda, Kab. Maluku Tengah	
20.	Cengkih local	Ds. Luhu, Kab. Seram Bagian Barat	

- f. Kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan uji mutu APH

Kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan telah melaksanakan uji banding antar laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan uji mutu APH dengan melibatkan 7 laboratorium yang dinilai berkompeten dibidang uji mutu benih dan uji mutu APH.

- g. Pelayanan Teknik kegiatan pengawasan mutu termasuk kesehatan benih, dan peredaran benih perkebunan.

Dalam rangka memberdayakan kelembagaan perbenihan di wilayah kerja, maka secara reguler petugas PBT melaksanakan kunjungan ke penangkar benih sekaligus melakukan pengawasann peredaran benih. Kunjungan reguler ini menjadi sarana untuk melaksanakan bimbingan teknis ke penangkar benih dalam memproduksi benih. Selain itu setiap tahun diselenggarakan Pertemuan Teknis Pengembangan Sistem Pengawasan Perbenihan yang dihadiri oleh Penangkar aktif, Dinas yang membidangi perbenihan tanaman perkebunan di wilayah kerja, petugas PBT dari UPTD dan dari BBPPTP Ambon.

- h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu antara lain :

- 1) Demplot PHT dan Eksplorasi Klon unggul Lokal dalam rangka pengembangan jejaring dan kerjasama (9 propinsi binaan)
- 2) Demplot PHT pada tanaman Kelapa di Provinsi Maluku di Desa Suli Kec. Salahutu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan hama *Oryctes* sp dengan pendekatan PHT yang berwawasan lingkungan serta memperkenalkan metode pengendalian secara terpadu dengan menggunakan APH, perangkat feromon dan sanitasi kebun
- 3) Demplot PHT pada Tanaman Pala di Provinsi Maluku di Desa Hila bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara terpadu dengan menggunakan sistem PHT
- 4) Demplot PHT Pada Tanaman Cengkeh Di Provinsi Maluku di Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat. Kegiatan ini bertujuan menekan serangan hama penggerek batang dan *Nothopeus* SP dengan menggunakan pupuk NPK, Furadan dan Sanitasi
- 5) Pengujian Aflatoksin pada Biji Pala  
Pengujian Aflatoksin telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon sebanyak 37 sampel Provinsi Maluku. Kegiatan pengambilan sampel berlangsung secara internal dalam rangka uji coba alat dan metode serta peningkatan kompetensi analis dan

laboran. Telah dilakukan validasi metode uji terhadap metode yang digunakan dengan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan laboratorium.

Tabel. 7 Rekapitulasi Pengujian Aflatoksin

No	Komoditi	Jumlah Sampel	Jenis Aflatoksin	Jumlah Pengujian
1	Biji Pala	37	B1,B2,G1,G2	37

#### 6) Pengujian Residu Pestisida

Pengujian residu pestisida telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon dengan sampel dari wilayah kerja. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji bahan aktif Deltametrin yang terkandung dalam produk perkebunan (lada) yang selanjutnya akan di Laboratorium analisa pestisida.

Tabel 8. Rekapitulasi Pengujian Residu Pestisida

No	Komoditi	Jumlah Sampel	Jenis Aflatoksin	Jumlah Pengujian
1	Biji Lada	15	Deltametrin	15

#### 7) Pengujian Mutu APH

Laboratorium BBPPTP Ambon telah melaksanakan pengujian mutu APH ruang lingkup pengujian viabilitas dan kerapatan spora sebagai berikut : *Trichoderma* 18 sampel yang bersertifikat, *Beauveria bassiana* 29 yang

bersertifikat, dan *Metharizium* 14 sertifikat dari jumlah sampel masuk (Ruang lingkup) sebanyak 61 sampel.

Tabel 9. Rekapitulasi Pengujian Mutu APH

No	Jenis APH	Jumlah Sampel	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian
1	<i>Trichoderma sp</i>	18	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	18
2	<i>Merharizium anisopliae</i>	14	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	14
3	<i>Beauveria bassiana</i>	29	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	29

8) Eksplorasi, Identifikasi dan Koleksi APH

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi tengah Kabupaten Donggala Selatan Kec. Benawa Desa Salompaku dan Bambarimbi ditemukan pada sampel tanah untuk komoditi kakao ditemukan *Trichoderma spp*, untuk komoditi kelapa ditemukan dan pada desa Biromaru, untuk komoditi kakao ditemukan jamur *Thricoderma spp*.

9) Identifikasi dan koleksi OPT Penting di Laboratorium dan Lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu :

- a. Lokasi pengambilan sampel di Desa Pasale Kecamatan Rante Pau Kabupaten Toraja Utara. Hasil identifikasi OPT cengkih yaitu penyakit karat

- daun, penyakit embun jelaga dan penyakit penghisap kutu pucuk.
- b. Lokasi pengambilan sampel di Desa Pasale Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil identifikasi OPT Kopi di pembibitan yaitu karat daun, embun jelaga, kutu tempurung hijau.
  - c. Lokasi pengambilan sampel di Desa Ka'do To'rea Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil identifikasi OPT Kopi di kebun sumber benih yaitu penyakit karat daun, penyakit embun jelaga, penyakit kutu penghisap pucuk
  - d. Lokasi pengambilan sampel di Desa Kalosi Kabupaten Tikala provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil identifikasi OPT Lada di kebun induk yaitu hama penghisap pucuk daun, bunga dan buah, hama penggerek batang.
  - e. Lokasi pengambilan sampel di Desa Karang kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil identifikasi OPT Lada di kebun Induk yaitu hama penghisap daun



10) Analisa Gangguan Usaha Perkebunan Non OPT

Dalam tahun 2016 telah dilakukan inventarisasi data GUP non OPT di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang selanjutnya membuat rekomendasi antisipasi serta pengendaliannya ke Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kab/Kota.

11) Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Pelayanan teknis kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan diselenggarakan dalam bentuk pemberian pelayanan bagi petani, petugas Dinas provinsi/kabupaten/kota, instansi terkait. Salah satunya petugas POPT/PBT sebagai nara sumber pada kegiatan pelatihan atau aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi perkebunan. Beberapa rekomendasi pengendalian OPT di lapangan diterbitkan oleh BBPPTP Ambon. Selain itu dalam proses pengadaan peralatan laboratorium APH di Dinas yang membidangi perkebunan di wilayah kerja, BBPPTP Ambon diminta sebagai tim teknis.

12) Pengelolaan data dan Informasi Proteksi dan Benih

Informasi mengenai benih dan proteksi tanaman perkebunan dapat diakses melalui website

[www.ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpambon/](http://www.ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpambon/) untuk komunikasi dapat melalui telp/fax : 0911-361203/361325 atau email [bbp2tp\\_ambon@yahoo.com](mailto:bbp2tp_ambon@yahoo.com). Telah diterbitkan buletin Rempah sebagai media informasi bagi pemangku kepentingan yang terkait dan bagi pihak yang membutuhkan. Secara reguler petugas POPT, PBT dan PMHP menulis siaran pedesaan yang disiarkan oleh RRI. Selain itu dibuat leaflet, brosur, buku petunjuk mengenai benih dan proteksi untuk petugas dan petani serta pemangku kepentingan yang lain.

13) Akreditasi laboratorium benih dan proteksi

Dalam tahun 2016, Laboratorium BBPPTP Ambon telah berhasil mempertahankan akreditasi dari KAN sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 dengan nomor LP-606-IDN tanggal 21 September 2016. Ruang lingkup kegiatan laboratorium yang terakreditasi adalah :

- a. Laboratorium benih, bidang pengujian fisika/biologi :
  - Uji kadar air benih (% berat) kakao
  - Uji daya berkecambah benih (% jumlah) kakao, pala dan cengkeh
  - Uji kemurnian fisik benih (% berat) kakao
- b. Laboratorium proteksi, bidang pengujian biologi :
  - Uji viabilitas (% jumlah) jamur *Metarhizium anisopliae*, jamur *Trichoderma* spp, jamur *Beauveria bassiana*

- Uji kerapatan spora (Jumlah spora/ml) jamur *Metarhizium anisopliae*, jamur *Trichoderma* sp, jamur *Beauveria bassiana*

14) Membangun Jejaring dan Kerjasama

Telah dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unpatti dengan merekrut tenaga praktisi pendamping yaitu Dr. Ir. I. Marzuki M.Si untuk bidang perbenihan tanaman perkebunan dari Ir. H.R.D. Amanupunyo, MP untuk bidang proteksi.

Selain itu beberapa dosen senior dari Unsoed Purwokerto (Prof. D. Ir. Leokas Soetanto, P.Hd, UGM Yogyakarta (Dr. Suputa,SP,MP) dan beberapa dosen senior IPB Bandung juga terlibat dalam beberapa kegiatan BBPPTP Ambon sebagai nara sumber.

15) Dana perekat

Mulai dari tahun 2016 setiap UPTD benih dan proteksi lingkup wilayah kerja BBPPTP Ambon diberikan dana sebesar Rp. 60.500.000,- /UPTD untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengendalian OPT dan pengawasan benih tanaman perkebunan. Dana ini dimaksudkan sebagai perekat kegiatan antara Dinas yang membidangi perkebunan di wilayah kerja dengan BBPPTP Ambon dengan judul kegiatan :

- Prov. Sulawesi Selatan : Demplot PHT Pengendalian Busuk Pangkal Batang Lada
- Prov. Sulawesi Utara : PHT Aceria Guerreronis Keifer pada tanaman kelapa
- Prov. Sulawesi Tengah : Eksplorasi dan inventarisasi OPT Tanaman Perkebunan
- Prov. Sulawesi Barat : Demplot pengendalian PHT pada tanaman kakao
- Prov. Maluku Utara : Uji Observasi Klon Unggul Lokal Pala
- Prov. Gorontalo : Demplot Pengendalian hama pada tanaman Kakao
- Prov. Sultra : Uji Efikasi Metabolisme Sekunder Thricoderma Spp terhadap penyakit VSD pada tanaman kakao
- Prov. Papua Barat : Kebun Sehat Kakao
- Prov. Papua : Demplot PHT pada Tanaman Kakao

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN, UPAYA TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI**

#### **4.1. Permasalahan**

1. Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin.

Dalam tahun 2016, BBPPTP Ambon telah melakukan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala dan kandungan residu pestisida deltametrin pada lada. Tenaga fungsional PMHP yang melaksanakan pengujian berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang PMHP Ahli muda dan 2 orang PMHP trampil pelaksana. Kendala yang dihadapi adalah sampai dengan saat ini, tugas fungsi BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian tersebut diatas belum diatur dalam Permentan No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja BBPPTP Ambon.

Pengujian kandungan aflatoksin dan residu pestisida yang dilaksanakan oleh laboratorium pestisida berawal dari kebutuhan daerah terkait dengan adanya penolakan pembeli dari negara-negara di Eropa karena adanya kandungan aflatoksin yang melebihi ambang batas yang disyaratkan. Disamping itu tidak tersedianya laboratorium penguji yang terakreditasi untuk melaksanakan pengujian tersebut di

provinsi Maluku. Akhirnya berawal dari serangkaian asesmen oleh Direktorat PPHP dan Dinas Pertanian provinsi Maluku maka dipilihlah laboratorium BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, laboratorium BBPPTP Ambon menerima peralatan dan bahan laboratorium dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk pengujian kandungan residu pestisida dan aflatoksin.

Berdasarkan tuntutan konsumen terhadap pengujian kandungan residu pestisida, dan aflatoksin maka kedepan perlu adanya penambahan tugas dan fungsi BBPPTP Ambon di bidang pengujian tersebut.

## 2. Adopsi teknologi

Partisipasi petani masih kurang dalam mengadopsi teknologi pengendalian hama terpadu yang diterapkan oleh POPT. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas serangan OPT akibat tidak dilaksanakannya sanitasi, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemangkasan. Di lain pihak, perhatian terhadap usaha tani perkebunan masih belum maksimal karena petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun. Petani lebih cenderung melihat hasil dari pada mengikuti proses, mengakibatkan lambatnya adaptasi teknologi tersebut.

3. Biaya operasional pengelolaan laboratorium benih dan proteksi

Seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis pengujian di laboratorium benih dan proteksi, maka biaya operasional pengujian makin meningkat. Alokasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengujian harus mengimbangi setoran PNBP. Perolehan PNBP berasal dari pengujian dan sertifikasi mutu benih, pengujian mutu APH dan pengujian kandungan aflatoksin. Masih rendahnya PNBP karena pengujian aflatoksin, residu pestisida, pengujian mutu APH dan pengujian mutu benih di laboratorium masih bersifat internal, sampel yang diambil oleh petugas untuk kepentingan pengembangan metode uji belum mencakup pelanggan eksternal.

4. Pengawasan peredaran benih lintas provinsi

Masih dijumpai di lapangan benih yang beredar belum bersertifikat dan berlabel. Peredaran benih ini berlangsung dalam jumlah besar dari pelabuhan resmi maupun yang tidak resmi di luar jangkauan pemantuan petugas. Masalah ini makin meluas dengan rendahnya tingkat pemahaman petani terhadap pentingnya penggunaan benih yang bersertifikat dan berlabel. Untuk itu perlu adanya koordinasi pengawasan peredaran dengan instansi terkait seperti Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat

kabupaten/kota, pengawas benih tanaman, korwas PPNS, aparat keamanan di tingkat desa sampai dengan provinsi, dan petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan serta petugas Karantina Pertanian. Koordinasi yang dibangun untuk pengawasan peredaran benih sampai dengan tahun 2016, masih meliputi korwas PPNS, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten/kota dan Pengawas Benih Tanaman.

5. Produsen benih

Masih maraknya penangkar benih musiman yang tidak memiliki Ijin Produksi Benih, kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas, kurang paham mengenai aturan perbenihan. Kedepan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait lainnya tetap dilaksanakan.

6. Kebun sumber benih

Penerapan Permetan No. 50 tahun 2015, yang mengatur penetapan sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan belum diantisipasi dengan baik oleh daerah, sehingga masih banyak kebun sumber benih berupa Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang belum ditetapkan sebagai sumber benih. Kedepan akan menjadi masalah dalam proses sertifikasi karena keberadaan sumber benih belum jelas.



Dalam tahun anggaran 2016, BBPPTP Ambon telah memfasilitasi penilaian dan pengusulan penetapan sumber benih pala sebanyak 2 kebun dan kelapa sebanyak 22 kebun.

Hal ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas yang membidangi perkebunan untuk mengusulkan kebun sumber benih agar dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

#### 7. Pengelolaan database proteksi dan benih

Tingkat pemahaman petugas pengamat dalam melakukan pendataan, pengolahan, pelaporan data OPT belum maksimal, tenaga pengamat tidak tersedia di semua lokasi kabupaten/kota oleh karena pemekaran wilayah, jangkuan wilayah pengamatan tidak sebanding dengan jumlah petugas di lapangan, disamping itu faktor usia tenaga pengamat yang dalam lima tahun ke depan memasuki batas usia pensiun.

Hal ini mengakibatkan distribusi pengiriman data pengamatan OPT belum sesuai jadwal yang ditentukan, pengolahan data dan pelaporan mengalami keterlambatan. Pengelolaan database perbenihan belum terlaksana dengan baik, mekanisme yang dibangun untuk mengumpulkan data

dan informasi yang terkait dengan perbenihan di wilayah kerja belum diatur.

Hal ini mengakibatkan data terkini mengenai kebun induk, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih, produsen benih, jalur peredaran benih tidak mudah diperoleh.

8. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan  
Tingkat pengetahuan dan pemahaman petani dalam menghasilkan sarana produksi berupa pupuk dan APH untuk pengendalian OPT secara mandiri masih belum optimal. Kebiasaan menerima bantuan secara gratis dari pemerintah mengakibatkan sulitnya membiasakan petani memproduksi sendiri sarana produksi.  
Pemeliharaan ternak dalam kandang koloni tidak biasa dilakukan oleh petani, hal ini mengakibatkan tingginya tingkat mortalitas hewan peliharaan. Perlu kerja keras untuk merubah kebiasaan petani dalam memelihara ternak dan memproduksi saprodi secara mandiri.

## **4.2. Isue Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti**

### **a. Akreditasi Laboratorium**

Kedepan tuntutan konsumen terhadap kualitas produk perkebunan yang di ekspor akan semakin ketat. Untuk mendukung hasil pengujian laboratorium yang diakui

secara internasional apabila terjadi tuntutan/klaim dari konsumen, laboratorium pengujian yang terakreditasi menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan. Untuk itu upaya Balai untuk penambahan ruang lingkup akreditasi khususnya untuk pengujian residu pestisida, uji kandungan aflatoxin, uji kadar air pala dan cengkeh dan uji daya kecambah benih pala serta uji mutu APH cair perlu didukung penyelesaiannya.

b. Penguatan SDM.

Sumberdaya manusia untuk menunjang tugas dan fungsi masih belum memadai, yaitu masih terbatasnya petugas Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengendali OPT, Tenaga Laboran, Petugas Pengambil Contoh. Kedepan perlu diusulkan untuk penambahan tenaga teknis POPT, PBT, PMHP dan PPC, tenaga laboran, serta tenaga pengamat di lapangan.

c. Status tanah

Pada saat penyerahan aset proyek kepada UPT tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (sertifikat/surat hibah/kuitansi pembelian/surat pembebasan tanah) sehingga sebagian besar tanah bangunan UPT dan perangkat tidak memiliki kepastian hukum dan dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam

tahun 2013, telah dianggarkan penyelesaian sertifikat tanah. Pada tahun 2016 ini sudah terlaksanakan proses sertifikat tanah pada beberapa UPPT antara lain : pada kantor LUPH, UPPT Taniwel, UPPT Hila dan UPPT Jailolo, Kedepan diharapkan dapat dilakukan sertifikasi tanah khusus untuk bangunan kantor BBPPTP Ambon, dan Brigade Proteksi.

d. Pengelolaan data base

Mekanisme pengelolaan database benih dan proteksi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, valid dan dapat dipercaya serta memudahkan pemangku kepentingan mengakses data lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan.

e. Adopsi teknologi proteksi tanaman perkebunan

Kedepan diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut dengan membangun lebih banyak demplot PHT untuk pengendalian OPT.

f. Pembiayaan operasional laboratorium

Penerimaan PNBP dari pengujian laboratorium dan sertifikasi benih tanaman perkebunan perlu ditingkatkan dengan menjaring lebih banyak pelanggan eksternal. BBPPTP Ambon perlu meningkatkan promosi mengenai jenis pengujian dilaboratorium. Dengan demikian diharapkan biaya operasional laboratorium dapat dibantu dari pengelolaan penerimaan PNBP.

g. Benih bersertifikat dan berlabel.

Pengawasan terhadap benih bersertifikat dan berlabel perlu ditingkatkan dengan mengurangi peredaran benih yang ilegal, meningkatkan jumlah produsen benih yang memiliki izin produksi benih, meningkatkan jumlah kebun sumber benih (KI,BPT,PIT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.

h. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan

Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa organik, melakukan pendekatan persuasif ke kelompok tani sasaran untuk memproduksi sendiri saprodi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Ambon tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama periode tahun 2016. Kegiatan yang terkait dengan fungsi pelayanan dalam rangka menjadikan BBPPTP Ambon sebagai Balai yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

### **B. Saran**

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi BBPPTP Ambon, maka monitoring, evaluasi dan pemantauan secara berkala perlu dilakukan oleh Tim SPI. Pengawasan terhadap kinerja Tim SPI harus secara berkala dievaluasi oleh atasan langsung.

## CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA (OUTPUT)

No	Program / Kegiatan Utama			Anggaran (Rp) Keluaran			Keluaran		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1781.001	003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	2.135.600.000	2.114.292.000	99	.6 Desa	6 Desa	100
2		001	Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	867.350.000	787.550.000	90,80	200.000 batang	6.395.047 Batang	300
3		002	Pengembangan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	2.663.050.000	2.562.680.000	96,23	12 Paket	12 Paket	100
4		003	Fasilitasi teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	3.313.240.000	3.144.343.403	94,90	12 Bulan	12 Bulan	100
5		994	Layanan Perkantoran	11.135.011.000	10.049.131.078	90,25	12 Bulan	12 Bulan	92
6		997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.722.460.000	1.704.930.700	98,98	26 unit	26 unit	100
7		998	Gedung/Bangunan	1.482.600.000	1.480.130.000	99,83	25 M2	25 M2	100
8									
				23.319.311.000	21.843.057.181	93,67			

Posisi Desember 2016

